

- ✦ **PENINGKATAN STATUS SOSIAL DAN KETIDAKADILAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA PENDIDIKAN FORMAL**

Oleh Laros Tuhuteru

- ✦ **PENDIDIKAN TOLERANSI MALALUI PENELUSURAN JEJAK KEDATANGAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA**

Oleh Efilina Kissiya

- ✦ **SARANA DAN PRASARANA PENJAS DI SEKOLAH ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN: Analisis Kebijakan Pendidikan**

Oleh Jonas Solissa

- ✦ **MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SEJARAH MELALUI PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOMPETITIF PADA SISWA SMP NEGERI 1 LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Oleh Wa Ima

- ✦ **HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA SISWA KELAS VII SMP ANGKASA LANUT PATTIMURA AMBON**

Oleh Agustinus Soumokil

- ✦ **TES KOMPETENSI BERBAHASA YANG INTEGRATIF**

Oleh Jolanda Dessye Parinussa

- ✦ **PEMBELAJARAN GEOLOGI: KAJIAN PELAPUKAN GEOLOGI**

Oleh Hasan Boinauw

- ✦ **PEMBELAJARAN SEJARAH DALAM KONTEKS PENDIDIKAN IPS**

Oleh Hamid Dokolamo



literasi



29/06/2010

SARANA DAN PRASARANA PENJAS DI SEKOLAH ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN: Analisis Kebijakan Pendidikan

Oleh Jonas Solissa

*Dosen Program Studi Penjaskesrek
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura*

Abstrak: Sarana dan prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Sarana olahraga merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh suatu sekolah untuk keperluan olahraga pendidikan. Prasarana merupakan penunjang untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Tujuan diadakan sarana dan prasarana adalah memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan pendidikan jasmani dan memungkinkan pelaksanaan program belajar mengajar pendidikan jasmani. Keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah sangat menghambat keefektifan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan isu yang merata dan terasa oleh pelaksana penjas. Secara umum sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikan selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran penjas dan olahraga.

Kata-Kata Kunci: Sarana dan prasarana penjas, sekolah, harapan dan kenyataan.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih dan direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Keberhasilan proses pembelajaran pendidikan Jasmani dan olahraga ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu guru dan sarana prasarana Pendidikan Jasmani sebagai alat untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar Sekolah. Faktor eksternal yaitu meliputi faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor

masyarakat, model pengembangan disiplin dan kesadaran guru dalam mengembangkan pengajaran yang bernuansa DAP (*developmentally appropriate practice*) yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.

Survei yang dilakukan oleh Pusat Kesegaran Jasmani Depdiknas, diperoleh informasi bahwa hasil pembelajaran Penjas di sekolah secara umum hanya mampu memberikan efek kebugaran jasmani terhadap kurang lebih 15 persen dari keseluruhan populasi peserta didik. Penelusuran sederhana lewat tes *Sport Search* (instrumen pemanduan bakat olahraga) dalam aspek yang berkaitan dengan kebugaran jasmani peserta didik SMU, peserta didik Indonesia rata-rata hanya mencapai kategori "Rendah. (Dirjen Olahraga Depdiknas 2002)

Rendahnya tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada sekolah dari semua tingkat satuan pendidikan di Indonesia dapat dijadikan satu petunjuk umum bahwa mutu program pendidikan jasmani di Indonesia masih rendah. Rendahnya mutu hasil pembelajaran pendidikan jasmani pun dapat disimpulkan dari keluhan masyarakat olahraga yang mengindikasikan bahwa mutu bibit olahragawan usia dini dari sekolah-sekolah kita sangat rendah. Keluhan ini dapat dikaitkan dengan dua hal. *Pertama*, para calon olahragawan kita memiliki kelemahan dalam hal kemampuan motoriknya, dari mulai kecepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan kesadaran ruangnya; *Kedua*, para calon olahragawan kita sekaligus memiliki kekurangan dalam hal kemampuan fisik, terutama dalam hal daya tahan umum, kekuatan, kelentukan, *power*, dan daya tahan otot lokal.

Tentu menjadi pertanyaan, mengapa mutu hasil pembelajaran penjas di Indonesia bisa sedemikian rendah? Apakah karena faktor guru yang juga kualitasnya rendah? ataukah disebabkan faktor lain seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai? Ataukah semua kelemahan ini harus dialamatkan pada kurikulum yang tidak relevan, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam hal pentingnya pendidikan jasmani?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tentu tidak mudah. Diperlukan penelusuran cermat yang melibatkan berbagai alat telaah multidisipliner, baik yang melibatkan tinjauan dari aspek filosofis, sosiologis, psikologis, budaya, ekonomi serta politik. Namun dalam wilayah praksis, kita dapat mendekati permasalahan ini dalam hubungannya dengan kemampuan guru, kurikulum yang diberlakukan dalam program Penjas di Indonesia dan sarana/ prasarana penudukung prose pembelajaran penjas dan olahraga di sekolah-sekolah.

Secara umum sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikan selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana prasarana ini. Tidak sedikit sekolah di Indonesia, khusus di daerah perkotaan tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktifitas jasmani, khusus yang berkaitan dengan olahraga lapangan. Walaupun ada jumlahnya tidak proporsional dengan jumlah siswa. Sering kali ditambah dengan kualitas yang kurang memenuhi tuntutan pembelajaran.

Isu kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran penjas di sekolah-sekolah merupakan salah satu isu dari sekian banyak isu

pendidikan saat ini dapat memberi petunjuk sebagai salah satu penyebab penurunan mutu penjas di Indonesia dan rendahnya kemampuan motorik calon-calon olahragawan kita. Hal ini menarik untuk dikaji agar dapat menemukan solusi pemecahannya.

PEMBAHASAN

Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah (Permen Nomor 24 Tahun 2007). Sarana pendidikan jasmani merupakan terjemahan dari "*Facilities*", sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: (1) peralatan (*apparatus*). Peralatan adalah sesuatu yang digunakan, contoh: palang tunggal, palang sejajar, gelang-gelang, kuda-kuda, dan lain-lain, (2) perlengkapan (*device*), terdiri dari Pertama, sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana, misalnya; net, bendera untuk tanda, garis batas dan lain-lain. Kedua, sesuatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan atau kaki, misalnya; bola, raket, pemukul dan lain-lain.

Menurut Soepartono, (2000) sarana olahraga merupakan kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi oleh suatu sekolah untuk keperluan olahraga pendidikan. Jadi penyediaan fasilitas terbuka merupakan dasar kebutuhan pokok dari perencanaan olahraga. Karena olahraga diakui memiliki nilai yang positif. Jika kebutuhan akan fasilitas olahraga ini tidak dipenuhi, kemungkinan peserta didik akan melakukan kegiatan yang menjurus ke arah negatif, sedangkan prasarana

adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan (Permen Nomor 24 Tahun 2007). Secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang penyelenggaraan suatu proses (usaha atau pembangunan).

Dunia olahraga mendefinisikan prasarana sebagai sesuatu yang mempermudah atau memperlancar tugas guru atau pelatih dan memiliki sifat yang relatif permanen (Soepartono, 2000). Salah satu sifat tersebut susah dipindahkan. Pada prasarana olahraga yang dipakai dalam kegiatan olahraga pada masing-masing cabang olahraga memiliki ukuran yang standar. Akan tetapi apabila olahraga tersebut dipakai sebagai materi pembelajaran pendidikan jasmani, sarana yang digunakan bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa. Prasarana merupakan penunjang yang dapat memperlancar dan mempermudah pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Keterbatasan prasarana yang ada di sekolah sangat menghambat keefektifan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga.

Prasarana pendidikan jasmani dan olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: (1) dalam ruangan (*indoor facilities*), meliputi ruang serbaguna atau hall/hale untuk kegiatan senam, bulutangkis, tenis meja, basket, voli, olahraga beladiri, ruang ganti pakaian dengan tempat pakaiannya, ruang mandi dan lain-lain, (2) di luar ruangan (*outdoor facilities*), meliputi lapangan terbuka untuk mengajar permainan, lapangan bola basket, lapangan bola voli, bak lompat jauh dan lain-lain.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah seluruh komponen yang saling mendukung meliputi peralatan, perlengkapan, fasilitas *indoor* dan fasilitas *outdoor*.

Menurut Abror Hisyam (1991) Tujuan diadakannya sarana dan prasarana adalah untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan pendidikan jasmani dan memungkinkan pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani.

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani dan Olahraga

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Penjas dan Olahraga di Sekolah, Madrasah Pendidikan umum, dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Tempat Bermain/Berolahraga Untuk SD/MI

Rasio minimum luas tempat bermain/ berolahraga 3 m² peserta didik. Untuk SD/MI dengan banyak peserta didik kurang dari 180, luas minimum tempat bermain/berolahraga 540 m². Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran minimum 20 m x 15 m.

Tempat bermain/ berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/ Berolahraga

No	Jenis Peralatan Pendidikan	Rasio	Deskripsi
1	Tiang	1 buah/ sekolah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku
2	Bendera	1 buah/ sekolah	Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku
3	Peralatan	1 set/	Minimum 6 bola

	bola voli	sekolah	
4	Peralatan sepak bola	1 set/ sekolah	Minimum 6 bola
5	Peralatan senam	1 set/ sekolah	Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastic, tongkat
6	Peralatan atletik	1 set/ sekolah	Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, dan bak loncat
7	Peralatan seni budaya	1 set/ sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-masing SD/MI
8	Peralatan keterampilan	1 set/ sekolah	
9	Pengeras suara	1 set/ sekolah	
10	Tape recorder		

2. Tempat Bermain/ Berolahraga SMP/ MTs

Tempat bermain/berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m² peserta didik. Apabila jumlah peserta didik kurang dari 334 orang, luas minimum tempat bermain/ berolahraga adalah 1000 m² x 20 m yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.

Tempat bermain/ berolahraga dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel

Tabel 2. Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/Berolahraga

No	Jenis Peralatan Pendidikan	Rasio	Deskripsi
1	Tiang endera	1 buah/ sekolah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku
2	Bendera	1 buah/ sekolah	Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku
3	Peralatan bola voli	1 set/ sekolah	Minimum 6 bola
4	Peralatan sepak bola	1 set/ sekolah	Minimum 6 bola
5	Peralatan bola basket	1 set/ sekolah	Minimum 6 bola
6	Peralatan senam	1 set/ sekolah	Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat, palang tunggal, gelang
7	Peralatan atletik	1 set/ sekolah	Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, dan bak loncat
8	Peralatan seni budaya	1 set/ sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-masing SD/MI

9	Peralatan keterampilan	1 set/ sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-masing
10	Pengeras suara	1 set/ sekolah	
11	Tape recorder	1 buah/ sekolah	

3. Tempat Bermain/ Berolahraga SMA/MA

Tempat bermain/ berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m² peserta didik. Untuk dengan banyak peserta didik kurang dari 334, luas minimum tempat bermain/ berolahraga 1000 m². Di dalam luas tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 30 m x 20 m.

Tempat bermain/ berolahraga dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum tabel 3.

Tabel 3. Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/Berolahraga

No	Jenis Peralatan Pendidikan	Rasio	Deskripsi
1	Tiang endera	1 buah/ sekolah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku
2	Bendera	1 buah/ sekolah	Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku
3	Peralatan bola voli	1 set/ sekolah	Minimum 6 bola
4	Peralatan sepak bola	1 set/ sekolah	Minimum 6 bola
5	Peralatan bola basket	1 set/ sekolah	Minimum 6 bola
6	Peralatan senam	1 set/ sekolah	Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat, palang tunggal, gelang
7	Peralatan atletik	1 set/ sekolah	Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, dan bak loncat
8	Peralatan seni budaya	1 set/ sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-masing SD/MI
9	Peralatan keterampilan	1 set/ sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-masing
10	Pengeras suara	1 set/ sekolah	
11	Tape recorder	1 buah/ sekolah	

Realitas Guru Penjas di Sekolah

Secara umum sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikan selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan

sarana prasarana. Tidak sedikit sekolah di Indonesia, khusus di daerah perkotaan tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktifitas jasmani, khusus yang berkaitan dengan olahraga lapangan. Walaupun ada jumlahnya tidak proporsional dengan jumlah siswa. Sering kali ditambah dengan kualitas yang kurang memenuhi tuntutan pembelajaran.

Seringkali seorang guru Pendidikan Jasmani mengeluhkan keadaan sarana dan prasarana sekolah tempat ia mengajar. Terkadang, seorang guru penjas harus “bertengkar” dengan kepala sekolah untuk menyediakan fasilitas olahraga di sekolah. Sementara menurut pemikiran sebagian orang, pelajaran pendidikan jasmani tidak begitu penting, mengingat pelajaran tersebut tidak masuk dalam ujian nasional (UN) atau ujian akhir berstandar nasional (UASBN). Jadilah pelajaran pendidikan jasmani menjadi “anak tiri” di sekolah, sehingga kurang mendapat perhatian yang serius. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang peran sentral pelajaran penjas dalam mendukung proses pendidikan secara menyeluruh.

Harus disadari bahwa sarana dan prasarana olahraga di sekolah sangat bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah lain. Jika sekolah memiliki fasilitas olahraga yang lengkap, sudah tentu tidak menjadi persoalan bagi sang guru. Permasalahannya adalah masih ditemukan ada sekolah dengan sarana dan prasarannya yang sangat terbatas. Sebuah sekolah idealnya memiliki lapangan terbuka seluas 20x40 meter, maka di atas lapangan itu bisa dibuat lapangan futsal, voli, bulu tangkis, sepak takraw, kasti. Kecuali untuk bola basket, lapangan harus di

semen dan membutuhkan fasilitas papan pantul dan ring. Tetapi jika sebuah sekolah, hanya memiliki lapangan yang lebih kecil dari ukuran di atas, maka guru penjas harus berpikir keras untuk memenuhi kewajiban pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa.

Tidak sedikit kegiatan pendidikan jasmani yang tidak dapat terlaksana dengan baik karena hambatan fasilitas yang tidak memadai. Banyak guru pendidikan jasmani yang mengeluhkan hal ini, dan banyak pula akibatnya terhadap aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani, misalnya kegiatan voli atau basket atau atletik atau bola tangan tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak mempunyai fasilitas lapangan tersebut.

Tetapi, kebanyakan sekolah telah memiliki lapangan yang berukuran seperti di atas, karena kebutuhan itu mutlak mengingat sebagai lapangan untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera. Jika kebanyakan sekolah telah memiliki lapangan yang telah memenuhi kebutuhan untuk melakukan aktifitas olahraga, bagaimana dengan perlengkapannya?, inilah persoalannya.

Peralatan olahraga yang lengkap tidak dimiliki semua sekolah. Ada yang hanya memiliki bola kaki dan bola voli saja, itupun jumlahnya sangat minim dan sudah bocor pula. Dengan jumlah siswa yang berkisar antara 25-35 orang, idealnya jumlah bola yang dimiliki sekolah 15 buah. Artinya kondisi perlengkapan olahraga yang ideal di sebuah sekolah setengah dari jumlah siswa satu kelas. Itu artinya, setiap sekolah idealnya harus memiliki 15 buah bola futsal, 15 buah bola voli, 15 buah bola takraw, 15 buah bola basket, 15 bola kasti, 15 buah raket dan *shuttlecock*, 15 buah bet dan bola

tenis meja. Sementara itu jumlah net bola voli, bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja dan bak lompat jauh cukup satu buah saja. Selanjutnya, ketersediaan gawang futsal dibutuhkan dua buah dan berkisar lima buah untuk perlengkapan lainnya seperti matras, gawang atletik, peluru tolak peluru, lembing, cakram.

Jika sebuah sekolah memiliki fasilitas seperti disebut di atas, maka seorang guru pendidikan jasmani akan menikmati tugasnya untuk menjadi fasilitator dengan penuh motivasi dan semangat. Tetapi, jika kesemua fasilitas tersebut di atas tidak dapat terpenuhi oleh sekolah, tidak mengendurkan semangat guru pendidikan jasmani untuk mengajar dengan menggunakan model pembelajaran seadanya. Kebanyakan guru pendidikan jasmanai mengeluh selalu menjadi korban, gaji mereka untuk kebutuhan keluarga mereka bukan untuk mengatasi minimnya perlengkapan pembelajaran. Kalau dipikirkan ada benarnya karena pendekatan modifikasi sarana sederhana pun membutuhkan anggaran.

Dengan kondisi seperti itu maka isu dapat saja menjadi murahan, tidak penting bahkan dipandang menyesatkan. Tapi ketika isu menabur dampak buruk apalagi dalam takaran serius, rasanya tidak arif kalau dianggap angin lalu. Bayangkan guru pendidikan jasmani sampai bertengkar dengan kepala sekolah, padahal tentang standar sarana dan prasarana penjas sudah diatur dalam undang-undang. Apakah kepala sekolah yang salah dalam hal ini?, ataukah sistem pendidikan kita saat ini yang salah?.

Kebijakan Pendidikan

Undang undang nomor 2 tahun 2000 yang mengatur tentang program pembangunan nasional secara tersirat menyebutkan salah satu tujuan pembinaan sekolah, mulai dari prasekolah sampai sekolah menengah dalam rangka mensukseskan terselenggaranya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan tujuan bahwa sekolah diberikan otonomi seluas luasnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

MBS adalah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka

Tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya. Namun hal ini sangat bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki sekolah dalam mempersiapkan dirinya dengan

pemahaman bersama atas visi misi tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolahnya.

Apakah kebijakan pendidikan dengan pendekatan MBS adalah solusi dalam memecahkan permasalahan mutu pendidikan pendidikan saat ini, termasuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah ?

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan tidak akan bermakna apa-apa tanpa diimplementasikan (dilaksanakan). Kebijakan yang tidak diimplementasikan tidak akan memberikan kontribusi terhadap kehidupan. Jadi, implementasi kebijakan merupakan hal penting, yang bahkan lebih penting dibandingkan formulasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan Wahab, bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan dari proses kebijakan. Menurutnya, implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik (Wahab, 2001).

Menurut Dharma, (2011) implementasi kebijakan paradigma baru sistem pendidikan nasional tersebut meliputi: *Pertama*, pengembangan dan pemantapan sistem pendidikan nasional dengan menitikberatkan pada pemberdayaan lembaga pendidikan melalui pemberian otonomi seluas-luasnya. *Kedua*, pengembangan sistem pendidikan nasional yang terbuka bagi keragaman budaya dan masyarakat dalam implementasinya. *Ketiga*, program pendidikan nasional hendaknya dibatasi hanya pada upaya

pelestarian integritas bangsa. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa untuk terlaksananya paradigma di atas diperlukan program-program yang mendukung, di antaranya adalah: *Pertama*, mempersiapkan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah yang meliputi SDM, organisasi, fasilitas dan program kerja sama antarlembaga di daerah. *Kedua*, debirokratisasi (demokratisasi) penyelenggaraan pendidikan dengan restrukturisasi departemen pusat agar lebih efisien dan secara bertahap memberikan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat sekolah (otonomi lembaga). *Ketiga*, desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan bertahap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota dengan penyediaan SDM, dana, sarana dan prasarana yang memadai pada daerah disertai dengan adanya panduan, arahan dan monitoring dari pusat. *Keempat*, penghapusan peraturan perundang-undangan yang menghalangi inovasi dan eksperimen menuju sistem pendidikan yang berdaya saing di masa depan. *Kelima*, otonomi bagi sekolah untuk mengatur diri sendiri dan peran masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan yang diwadahi dalam bentuk Dewan Sekolah. Fungsi pengawasan yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru serta adanya otonomi guru untuk menentukan metode dan sistem evaluasi belajar.

Menurut Russel, (2007) implementasi kebijakan sebagai "memahami" apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah

disahkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.

Analisis Kritis

Banyak orang beranggapan bahwa olahraga adalah pelajaran yang sepele karena pendidikan jasmani hanya mengandalkan lutut saja. Anggapan yang seperti inilah yang membuat pendidikan jasmani selalu dianak tirikan. Padahal tidak demikian, bila kita mau melihat lebih dalam lagi. Pendidikan jasmani juga memiliki peran untuk menyampaikan tujuan dari pendidikan tersebut sebagai contoh melalui pendidikan jasmani dapat dilatih kedisiplinan dan juga kerjasama pada siswa.

Salah satu visi dan misi dari pendidikan nasional adalah menciptakan peserta didik yang sehat dan juga kuat. Tetapi pada kenyataan dilapangan tidaklah sesuai dengan visi dan misi yang dibuat oleh pemerintah tersebut, karena perhatian pemerintah untuk pendidikan jasmani kurang diperhatikan. Kurangnya perhatian pemerintah pada pendidikan jasmani dapat kita lihat pada penyediaan sarana dan prasarana untuk pendidikan jasmani disekolah-sekolah yang sangatlah minim.

Di perdesaan penyediaan terhadap prasarana kebugaran jasmani tidaklah menjadi permasalahan yang berarti, hal ini terjadi karena penyediaan lahan yang ada disekolah-sekolah desa untuk kegiatan jasmani sangatlah cukup. Tetapi disini yang menjadi masalah mengenai penyediaan sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan jasmani tersebut.

Sebaliknya dikota kurang memiliki lahan yang cukup untuk melakukan

kegiatan jasmani tersebut. Sehingga sering kita jumpai pada sekolah sekolah yang ada dikota adanya sebuah lapangan yang multi fungsi yaitu adanya sebuah lapangan yang digunakan untuk berbagai jenis kegiatan olahraga. Tetapi pada sekolah-sekolah yang ada dikota memiliki saran yang lebih lengkap.

Bila kita melihat Kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, Tempat bermain/berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m² peserta didik tentulah sekolah yang ada didesa lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang ada dikota. Tapi juga karena kurang tersedianya sarana yang mencukupi tentunya ini akan menjadi sama saja bila dibandingkan dengan sekolah yang ada dikota.

Faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan, termasuk pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran selama ini kurang atau tidak berhasil adalah pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

SIMPULAN

Sarana dan prasarana pendidikan jasmani dan olahraga adalah fasilitas pendukung yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran

pendidikan jasmani atau kegiatan olahraga di sekolah.

Tujuan diadakannya sarana dan prasarana adalah untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan pendidikan jasmani dan memungkinkan pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani.

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani dan Olahraga di Sekolah, Madrasah dan Pendidikan Umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat menghambat keefektifan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Hal ini, pada umumnya sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana prasarana.

Manajemen Berbasis Sekolah adalah paradigma baru sistem pendidikan nasional, sebagai kebijakan pendidikan dalam mengatasi permasalahan pendidikan saat ini termasuk permasalahan kekurangan sarana dan prasarana di sekolah.

Implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai paradigma baru sistem pendidikan nasional harus dibarengi dengan penyediaan SDM, dana, sarana dan prasarana yang memadai pada daerah disertai dengan adanya panduan, arahan dan monitoring dari pusat.

Untuk mengatasi lahan sekolah yang sempit seperti di perkotaan dapat dilakukan pembangunan gedung olahraga yang bertingkat, sehingga lahan untuk kegiatan kesegaran jasmani dapat diperluas tanpa harus membutuhkan lahan yang terlalu luas.

Selain itu juga dengan cara pengadaan sebuah lapangan yang multi fungsi.

Sarana yang minim bukanlah masalah yang sepele meskipun dalam pembelajaran pendidikan jasmani masalah ini dapat disiasati. Guru penjas selaku pihak yang berhubungan dengan masalah ini harus lebih giat berusaha untuk pengadaan sarana tersebut, misalnya meminta bantuan pada pihak sekolah atau sponsor-sponsor produk olah raga.

SUMBER RUJUKAN

Direktorat Jenderal Olahraga. 2002. *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta: Depdiknas.

Hisyam Abror. 1991. *Sarana dan prasarana olahraga*. Semarang: Unes.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah>

<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0407/02/opini/1111851.htm>.

Dediknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

Mendikbud. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007*. Jakarta: Mendiknas

Russel. 2007. *Introducing Public Admistration*. New York: Pesrson

Soepartono. 2000. *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta: Depdiknas.

Wahab. 2001. *Analisis kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* Jakarta: Bumi Aksara.